

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara press,.
- Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress,
- Agus Dwiyanto dkk, 2002, *Reformasi Birokrasi Republik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada,
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Aim Abdulkarim, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta; Grafindo Media Pratama..
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin Anwar, 2006, *Pencitraan Dalam Politik*, *Pustaka Indonesia*, Jakarta.
- Bingham Powell Jr., 1991, dikutip Alfian dan Anazarudin Syamsudin (ed), "*Profil Budaya Politik Indonesia*" Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
- Dahlan Thaib, 2009, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999. , *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta : Total Media.

Didik Supriyanto, 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Pustaka Mina.

Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi, 2005, *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan* .Jakarta, IIP Press.

Eep Saefulloh Fatah, 1997, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Bandung: Mizan.

Evi Purnama Wati, 2015, “*Pemilu Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*”, E-Jurnal Hukum, Vol 8, No 2, Mei 2015.

Ferry Kurnia Rizkiansyah, 2007, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi*, Bandung: CV Alia Grafika,.

G.J. Wolhoff, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas NV.

H. A. W. Widjaja, 2011, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Cet. 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hendra Budiman, 2015 *Pilkada Tidak Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2014. , *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Huntington dalam Aidul Fitriaciada Azhari, 2004, “*Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi: Perspektif Ketatanegaraan*”, Jurisprudence, Vol 1, No 2, September 2004.

Imam Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Janedjri M. Gaffar, 2002, *Politik Hukum....., Op. Cit.*, Gramedia, Jakarta.

Janpatar Simamora, “*Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 23, No 1 Februari 2011.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: inar Grafika,.. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009..*Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Johnny Ibrahim, 2009, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*, Surabaya: Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Kacung Marijan, 2007, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratisasi di Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005., *Demokratisasi Di Daerah Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta:.

Martha Pigome, 2011, “*Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*”, Jurnal Dinamika, Vol 11, No 2.

Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho, 2008, *Sejarah Nasional Indonesia VI –Cet.II-Edisi Pemutakhiran*. Jakarta : Balai Pustaka.

Miriam Budihardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1981., *Demokrasi di Indonesia:Demokrasi Parlemerter dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta,Gramedia,1995., *Dasar-Dasar ilmu Politik*,Edisi Revisi Cetakan Kedua,Jakarta,Gramedia,Pustaka Utama, 2008., *Ciri-ciri Negara Demokrasi*, Pustaka Utama,Jakarta.

Muchamad Isnaeni Ramdhan, 2009, *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah Pilkada*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI.

Mulyana W. Kusumah, dkk, 1999, *Wacana Polotik Dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka.

Ni'mantul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung,Fokus media, 2009., *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Prenada Media, Yogyakarta.

- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sammuel P Huntington dan Joan M Nelson, 1997, *No Easy Choice, Political Participattion in Depeloping Countries*, Cambride, Mass: Harvad University Press,.
- Samsul Wahidin, 2008, *Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Yogyakarta:pustaka pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Rajawali Press,.
- Sri Soemantri, 1971, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Syamsudin Haris, 2005, *Mengapa Pilkada Langsung*. Jakarta: Majalah Bulanan Pamong Edisi 01/TH II/ Mei 2005.
- Tim Peneliti, 1998, *Sistem Pemilu, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan,.

Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita selekta, 2003, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Vokus Media.

Wendy Melfa, 2006, *Pemilukada Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas, tentara pendudukan Jepang. Lihat No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pokok-Pokok pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara, 2010: Sekretariat Jenderal dan Kepaniraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta .

C. Internet

<http://gemaputri.blogspot.co.id/2012/10/footnote-buku-internet-berita-koran.html>.

<http://www.edukasinesia.com/2016/06/sejarah-pemilihan-umum-pemilu-bangsa-indonesia-darimasa-ke-masa-terlengkap.html>.

<https://media.neliti.com/media/publications/112942-ID-penguatan-demokrasi-lokal-melalui-pengha.pdf>.

<https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perspektif-uud-1945.pdf>.

<http://politik.kompasiana.com/2014/09/09/jika-pilkada-di-dprd-gubernur-dki-jakarta2017-2022-berkarakter-seperti-haji-lulung-673337.html>.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/ringkasan%20putusan/Putusan%20PUU%2033-2010%20Pemda.pdf>.

<https://regional.kompas.com/read/2017/06/03/12140131/rp.817.miliar.anggaran.untuk.pilkada.jatim.2018>.

<https://jatim.antarane.ws.com/berita/300553/rencana-pembangunan-rsud-dikawasan-surabaya-timur-masih-dikaji>.

<https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/27/nkfo4m-berencanabangun-7-rumah-sakit-rs-mitra-incar-dana-ipo-rp4-triliun>.

<https://media.neliti.com/media/publications/57811-ID-pilkada-lan> .

<http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-demokrasi-pemilihancatatankritispeilihan-gubernur-oleh-dprd-dalam-ruu-pemilukada.htm>.

<http://www.suarapembaruan.com/home/icw-pilkada-oleh-dprd-bisa-tingkatkankorupsi/64537>.

